
Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA WAKULI KECAMATAN KAPONTORI KABUPATEN BUTON

¹Bardin, ²La Ode Muhammad Aرسال,

¹bardin297@gmail.com , ²laodemuhammadarsal8@gmail.com

^{1,2}Program Studi Sosiologi, Universitas Dayanu Ikhsanuddin

ABSTRACT

This study examines the forms and factors influencing political participation in the development of Wakuli Village, Kapontori District, Buton Regency. Political participation is a crucial element in village development, reflecting the community's engagement in decision-making processes and policy implementation. This research employs a qualitative approach, utilizing interviews, observations, and documentation as data collection methods. The findings reveal that political participation in Wakuli Village consists of both active participation, such as policy proposals and village head elections, and passive participation, which includes compliance with government policies. The key factors influencing participation include political awareness, public appreciation of government policies, and the impact of development policies on community welfare. Although political awareness among residents has gradually increased, challenges such as limited access to information and economic constraints persist. Therefore, greater government transparency and broader political education initiatives are necessary to enhance the quality of political participation and foster more inclusive and sustainable village development.

Keywords : *Political Participation, Village Development, Political Awareness.*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bentuk dan faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Partisipasi politik merupakan elemen penting dalam pembangunan desa yang mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Wakuli terdiri dari partisipasi aktif, seperti usulan kebijakan dan pemilihan kepala desa, serta partisipasi pasif yang meliputi kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi ini adalah kesadaran politik, apresiasi terhadap kebijakan pemerintah, serta dampak kebijakan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat. Meskipun kesadaran politik masyarakat semakin meningkat, masih terdapat kendala berupa keterbatasan akses informasi dan ekonomi. Oleh karena itu, keterbukaan pemerintah desa serta edukasi politik yang lebih luas diperlukan untuk meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci : *Partisipasi politik, Pembangunan Desa, Kesadaran Politik*

PENDAHULUAN

Demokrasi menuntut adanya masyarakat sipil yang terorganisir dengan kuat, mandiri, dinamis, pluralistik, beradab, dan partisipatif. Partisipasi politik menjadi aspek penting dalam masyarakat demokratis, menghubungkan rakyat dengan pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pembangunan desa. Partisipasi ini tidak hanya mencakup pemilihan kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan pembangunan, seperti Rencana Strategis Desa (Renstra Desa), program pembangunan, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APBDes). Secara konseptual, partisipasi politik memiliki dua dimensi utama, yaitu inklusi dan keterlibatan aktif. Inklusi menyoroti siapa yang memiliki akses untuk berpartisipasi, sementara keterlibatan aktif mengacu pada bagaimana masyarakat terlibat dalam proses politik dan pembangunan.

Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi politik masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai forum musyawarah, seperti Musyawarah Rencana Pembangunan Dusun (Musbangdus), Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musbangdes), dan Musyawarah Desa. Forum-forum ini tidak hanya menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi mereka, tetapi juga merupakan alat bagi pemerintah desa dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melibatkan tiga aspek utama: suara, akses, dan penguasaan. Suara mengacu pada hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dalam proses pembangunan, akses berkaitan dengan keterbukaan terhadap pengambilan keputusan dan sumber daya pembangunan, serta penguasaan yang memastikan adanya kontrol masyarakat terhadap lingkungan dan pelaksanaan pembangunan (Maschab, 2013).

Tingkat partisipasi politik masyarakat juga mencerminkan tingkat modernisasi politik dan pembangunan desa. Menurut Setiawan (2017), partisipasi politik masyarakat dapat dikategorikan ke dalam keterlibatan dalam proses perumusan kebijakan pembangunan dan komitmen dalam pembagian manfaat pembangunan secara adil (Setiawan, 2017). Hutagalung (2022) menegaskan bahwa partisipasi politik dalam pembangunan tidak hanya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, tetapi juga menjadi sarana

pendidikan politik bagi masyarakat (Hutagalung, 2022). Berarti bahwa dalam aspek implementasi pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses politiknya bukanlah proyek pembangunan yang sejati (Suparto, 2020).

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan memiliki implikasi penting terhadap responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Heryanto (2018) menyatakan bahwa efektivitas pembangunan sangat bergantung pada kesesuaian metode pembangunan dengan kondisi fisiologis, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat (Heryanto, 2021). Setiawan (2022) menambahkan bahwa kualitas partisipasi dapat diukur dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahap pembangunan, mulai dari perumusan tujuan hingga evaluasi proyek pembangunan (Setiawan A. , 2022).

Studi ini mengkaji bentuk dan faktor yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton. Desa Wakuli merupakan salah satu desa di Kecamatan Kapontori yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Seiring berjalannya waktu, desa ini mengalami perubahan dalam aspek pembangunan, seperti penyediaan sarana olahraga, penerangan jalan, serta pengadaan infrastruktur pertanian. Perubahan ini tidak terlepas dari keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Beberapa program pembangunan yang telah direalisasikan antara lain pembangunan pagar kantor desa (2015), pembangunan kantor Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pagar taman kanak-kanak (2016), pembangunan balai pertemuan dusun dan pos keamanan lingkungan (2017), serta pembangunan gedung taman kanak-kanak dan fasilitas MCK (2019). Pada tahun 2021, pembangunan aula kantor desa juga

telah direalisasikan, sementara rencana pembangunan tahun 2023 mencakup pembangunan balai dusun, rehabilitasi jembatan, serta ketahanan pangan dan penerangan jalan (<https://keckapontori.butonkab.go.id>).

Partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan di Desa Wakuli menunjukkan adanya sinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan. Namun, secara keseluruhan, dalam lingkup Kecamatan Kapontori, Desa Wakuli berada pada peringkat ke-13 dari 17 desa dalam hal pencapaian pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk partisipasi politik masyarakat serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan mereka dalam pembangunan desa. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap kajian sosiologi pembangunan dan menjadi referensi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih partisipatif dan inklusif dalam pembangunan desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli. Pendekatan ini memungkinkan penelitian mendeskripsikan secara mendalam pengalaman dan tindakan masyarakat melalui kata-kata dan bahasa dalam konteks alami (Moelong, 2014). Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu yang diamati (Lichtman, 2013). Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Wakuli, Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik sosial yang

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

relevan dalam mengkaji bentuk partisipasi serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Sumber data yang digunakan meliputi data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan masyarakat dan pemerintah desa serta data sekunder yang diperoleh dari bahan pustaka dan dokumen resmi.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mencatat fenomena yang terjadi di lapangan tanpa intervensi langsung terhadap partisipan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive, termasuk aparat desa dan masyarakat yang terlibat dalam pembangunan desa (Moelong, 2014). Informan yang dipilih terdiri dari enam individu yang memiliki keterlibatan langsung dengan topik penelitian, baik sebagai perangkat desa, petani, maupun tenaga pendidik.

PEMBAHASAN

Kerangka Analisis

Partisipasi politik masyarakat merupakan fenomena sosial yang mencerminkan keterlibatan individu atau kelompok dalam proses politik dan pembangunan. Dalam konteks pembangunan desa, partisipasi ini menjadi aspek penting dalam menentukan arah kebijakan dan keberlanjutan pembangunan. Partisipasi dapat berbentuk pengambilan keputusan, pelaksanaan kebijakan, pemanfaatan hasil pembangunan, serta evaluasi

terhadap kebijakan yang telah diterapkan (Dwiningrum, 2011). Partisipasi juga berkontribusi dalam membentuk struktur sosial yang lebih demokratis, di mana masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan publik (Tilaar & Nugroho, 2012).

Konsep politik yang berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat menjelaskan bagaimana keputusan diambil dan diimplementasikan dalam kehidupan sosial. Politik sebagai suatu sistem melibatkan berbagai aktor, termasuk individu, kelompok, dan lembaga pemerintahan, dalam upaya mencapai kepentingan bersama (Heywood, 2013). Politik juga mencerminkan dinamika kekuasaan, di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap kehidupan mereka (Almond & Powell., 2000).

Partisipasi politik dalam pembangunan desa memiliki berbagai bentuk, baik yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional (Masoed & MacAndrews, 2018). Partisipasi konvensional meliputi pemberian suara dalam pemilu, diskusi politik, kegiatan kampanye, serta komunikasi langsung dengan pejabat publik. Sementara itu, partisipasi nonkonvensional dapat berupa petisi, demonstrasi, atau bahkan aksi yang lebih radikal seperti pemogokan dan konfrontasi. Tingkat partisipasi politik dalam pembangunan desa juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kesadaran politik, penilaian terhadap kebijakan pemerintah, serta pengalaman individu dalam organisasi sosial (Surbakti, 1992).

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik dalam pembangunan desa mencakup modernisasi, perubahan struktur sosial, keterlibatan

pemerintah, serta dinamika hubungan antara pemimpin politik dan masyarakat (Masoed & MacAndrews, 2018). Modernisasi membawa perubahan dalam pola pikir masyarakat, yang berdampak pada peningkatan keterampilan politik dan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya juga dapat mempengaruhi sejauh mana masyarakat merasa terdorong untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Kerangka pikir dalam penelitian ini bertumpu pada konsep partisipasi politik sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramlan Subakti. Partisipasi politik dibagi menjadi dua bentuk utama, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif mencerminkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik secara langsung, seperti mengusulkan kebijakan umum, membayar pajak, serta memilih pemimpin dalam pemerintahan. Sementara itu, partisipasi pasif merujuk pada kepatuhan masyarakat dalam menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah tanpa keterlibatan aktif dalam perumusan kebijakan.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik ini meliputi aspek kesadaran politik, serta penilaian dan apresiasi terhadap kebijakan pemerintah dan implementasinya. Faktor-faktor ini berperan dalam menentukan seberapa besar keterlibatan masyarakat dalam proses politik dan pembangunan desa. Dengan demikian, penelitian ini menggunakan pendekatan struktural fungsional untuk menganalisis bagaimana berbagai faktor yang memengaruhi partisipasi politik berkontribusi terhadap pembangunan desa. Pemahaman terhadap dinamika partisipasi politik ini diharapkan dapat memberikan

wawasan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wakuli

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa merupakan bentuk keterlibatan aktif maupun pasif warga dalam menentukan kebijakan serta menjalankan program pembangunan. Di Desa Wakuli, partisipasi ini terlihat melalui usulan kebijakan, kewajiban membayar pajak, serta pemilihan pemimpin desa. Masyarakat turut serta dalam musyawarah desa untuk menyampaikan aspirasi, seperti penentuan penerima BLT dan kebijakan pembangunan infrastruktur. Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting guna menciptakan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan (Armadin, 2023).

Salah satu bentuk partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat adalah pembayaran pajak dan iuran. Pajak menjadi sumber pendapatan desa untuk pembangunan dan pelayanan publik. Namun, realitasnya masih terdapat warga yang belum mampu membayar pajak karena keterbatasan ekonomi. Meskipun demikian, kesadaran akan pentingnya pajak sudah mulai tumbuh di kalangan masyarakat. Mereka yang membayar pajak secara rutin merasa memiliki tanggung jawab terhadap kemajuan desa, sementara yang belum membayar menyadari kewajiban tersebut dan berencana untuk memenuhinya di masa depan (Harianto, 2023).

Selain itu, pemilihan pemimpin desa menjadi aspek penting dalam partisipasi politik masyarakat. Proses pemilihan kepala desa dilakukan dengan baik, meskipun masih terdapat indikasi money politic. Masyarakat menyadari pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas dan visi yang jelas dalam membangun desa. Oleh karena itu, edukasi politik yang lebih luas diperlukan agar masyarakat dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari praktik politik uang yang merugikan demokrasi desa (Endang, 2023).

Partisipasi pasif juga terlihat dalam penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah desa. Masyarakat menerima berbagai keputusan, seperti penetapan penerima BLT dan kebijakan sholat Idul Fitri bersama. Kepatuhan ini menunjukkan bahwa masyarakat percaya terhadap pemerintahan desa dan bersedia mendukung kebijakan yang dianggap membawa manfaat bagi kesejahteraan bersama. Namun, untuk meningkatkan kualitas partisipasi, diperlukan mekanisme yang lebih transparan agar masyarakat merasa lebih terlibat dalam proses pembuatan kebijakan (Febrianti, 2023).

Selain kepatuhan terhadap kebijakan desa, masyarakat juga menunjukkan antusiasme dalam kegiatan sosial yang mendukung pembangunan desa. Partisipasi dalam gotong royong, pembangunan fasilitas umum, serta kegiatan keagamaan menjadi bentuk lain dari keterlibatan mereka. Hal ini mencerminkan bahwa masyarakat Desa Wakuli tidak hanya terlibat dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga dalam implementasi kebijakan yang telah disepakati bersama.

Untuk memperjelas substansi wawancara yang dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

Tabel 1. Reduksi Data Subtansi Hasil Wawancara dengan Narasumber
(Partisipasi Aktif)

No	Nama Informan	Posisi	Bentuk Partisipasi	Pernyataan Singkat
1	Armadin (25)	Masyarakat	Usulan kebijakan	Mengusulkan larangan mengikat hewan ternak di lapangan desa.
2	Hariato (40)	Petugas Pajak	Pembayaran Pajak	Setuju dengan kewajiban pajak, namun ada warga yang belum membayar karena kendala ekonomi.
3	Endang (25)	Masyarakat	Pemilihan Pemimpin	Pemilihan pemimpin harus berdasarkan visi dan misi, bukan money politic.

Tabel 2. Reduksi Data Subtansi Hasil Wawancara dengan Narasumber
(Partisipasi Pasif)

No	Nama Informan	Posisi	Bentuk Partisipasi	Pernyataan Singkat
4	Febrianti (36)	Masyarakat	Kepatuhan Kebijakan	Menerima kebijakan pemerintah, terutama terkait BLT dan pemilihan kepala desa.
5	Husnan (29)	Masyarakat	Kepatuhan Kebijakan	Menyetujui kebijakan pemerintah karena menciptakan stabilitas sosial.

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

6	Khorintus (36)	Masyarakat	Kepatuhan Kebijakan	Mentaati kebijakan sholat Idul Fitri bersama untuk meningkatkan kebersamaan.
---	----------------	------------	---------------------	--

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli dapat dianalisis melalui dua bentuk utama, yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, usulan kebijakan, serta pemilihan pemimpin. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga sebagai aktor yang berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Misalnya, dalam musyawarah desa, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait penerima BLT dan pembangunan infrastruktur, dimana ini mencerminkan adanya demokratisasi dalam tata kelola desa. Selain itu, pembayaran pajak sebagai kewajiban warga mencerminkan kesadaran politik bahwa kontribusi ekonomi diperlukan untuk mendukung pembangunan desa. Namun, kendala ekonomi masih menjadi faktor yang menghambat keterlibatan penuh masyarakat, sehingga diperlukan kebijakan yang lebih inklusif agar seluruh warga dapat berpartisipasi secara optimal.

Di sisi lain, partisipasi pasif masyarakat Desa Wakuli tercermin dalam penerimaan dan kepatuhan terhadap kebijakan desa, seperti penetapan penerima bantuan sosial dan kebijakan keagamaan. Masyarakat cenderung mematuhi keputusan pemerintah desa tanpa keterlibatan langsung dalam perumusan kebijakan, yang sesuai dengan konsep partisipasi pasif menurut Ramlan Subakti. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan desa memiliki

tingkat legitimasi yang cukup tinggi di mata masyarakat, meskipun transparansi dalam pengambilan keputusan masih perlu ditingkatkan untuk mendorong partisipasi yang lebih aktif. Selain kepatuhan terhadap kebijakan, bentuk partisipasi lainnya terlihat dalam gotong royong pembangunan fasilitas umum, yang mencerminkan bahwa masyarakat tetap memiliki peran dalam implementasi kebijakan. Namun, modernisasi dan perubahan struktur sosial dapat berdampak pada pola partisipasi ini, dimana peningkatan akses informasi dan pendidikan politik akan menentukan sejauh mana masyarakat dapat berkontribusi secara lebih aktif dalam pembangunan desa.

Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Wakuli

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran politik, penilaian serta apresiasi terhadap pemerintahan, dan kebijakan pembangunan yang diterapkan. Kesadaran politik menjadi aspek fundamental yang menentukan sejauh mana masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung lebih aktif dalam proses politik, seperti pemilihan kepala desa dan penyampaian usulan kebijakan (Armadin, 2023). Kesadaran politik juga mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam aspek ekonomi, seperti membayar pajak demi mendukung pembangunan desa (Khorintus, 2023).

Penilaian serta apresiasi terhadap kinerja pemerintah juga berperan penting dalam mendorong partisipasi politik. Masyarakat Desa Wakuli menilai kebijakan pemerintah berdasarkan dampak yang mereka rasakan, seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas olahraga, dan pengadaan pupuk bagi petani (Endang, 2023). Apresiasi yang diberikan masyarakat mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan layanan publik dan memperbaiki kebijakan yang belum optimal (Harianto, 2023). Selain itu, masyarakat juga mengharapkan pemerintah untuk lebih melibatkan mereka dalam proses pengambilan keputusan guna menciptakan kebijakan yang lebih tepat sasaran (Husnan, 2023).

Kebijakan pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah desa berpengaruh langsung terhadap partisipasi politik masyarakat. Sejak tahun 2015, berbagai proyek telah dilaksanakan, seperti pembangunan pagar kantor desa, balai dusun, dan posyandu. Rencana pembangunan tahun 2023 meliputi perbaikan jembatan, ketahanan pangan, dan penyediaan lampu jalan. Capaian pembangunan seperti saluran sawah dan fasilitas olahraga menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Febrianti, 2023). Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program pembangunan menjadi indikator bahwa kebijakan yang dibuat memiliki dampak yang nyata dan dapat meningkatkan kualitas hidup warga desa.

Untuk memperjelas substansi wawancara yang dilakukan, berikut disajikan dalam bentuk tabel:

Tabel 3. Reduksi Data Subtansi Hasil Wawancara dengan Narasumber

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

(Faktor Pengaruh Masyarakat Berpartisipasi dalam Pembangunan)

No	Nama Informan	Posisi	Faktor Partisipasi Politik	Pernyataan Singkat
1	Armadin (25)	Masyarakat	Kesadaran Politik	Partisipasi politik harus dilakukan secara rasional agar menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
2	Khorintus (36)	Masyarakat	Kesadaran Politik	Membayar pajak adalah kewajiban yang harus dilakukan demi pembangunan desa.
3	Febrianti (36)	Masyarakat	Kesadaran Politik	Masyarakat harus terlibat dalam pembuatan kebijakan agar aspirasi mereka didengar.
4	Husnan (29)	Masyarakat	Apresiasi terhadap Pemerintah	Pemerintah harus meningkatkan kinerja untuk memperkuat partisipasi masyarakat.
5	Endang (25)	Masyarakat	Apresiasi terhadap Pemerintah	Kebijakan pembangunan infrastruktur sangat membantu kesejahteraan masyarakat.
6	Hariantanto (40)	Masyarakat	Kebijakan Pembangunan	Pemerintah perlu memastikan distribusi pupuk merata agar petani mendapatkan manfaatnya.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesadaran politik, apresiasi terhadap pemerintahan, dan kebijakan pembangunan merupakan faktor utama yang mempengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Partisipasi yang berbasis kesadaran politik mendorong masyarakat untuk memilih pemimpin secara bijak dan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak. Apresiasi terhadap kinerja pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, sementara kebijakan pembangunan yang tepat sasaran akan

mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mendukung program-program desa. Oleh karena itu, transparansi dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan harus terus diperkuat guna meningkatkan kualitas pembangunan yang berkelanjutan.

Faktor utama yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli adalah kesadaran politik, keterlibatan pemerintah, dan perubahan struktur sosial. Masyarakat yang memiliki kesadaran politik tinggi cenderung lebih aktif dalam musyawarah desa, pemilihan kepala desa, serta pengusulan kebijakan. Namun, di beberapa kelompok, partisipasi ini masih rendah akibat kurangnya akses terhadap informasi politik dan edukasi masyarakat. Keterlibatan pemerintah juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi, terutama melalui transparansi kebijakan dan keterbukaan dalam perumusan keputusan (Masoed & MacAndrews, 2018). Pemerintah desa yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi akan meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat peran masyarakat dalam proses pembangunan.

Faktor lainnya adalah dinamika hubungan antara pemimpin desa dan masyarakat, di mana keterbukaan pemimpin dalam mendengarkan aspirasi akan memperkuat keterlibatan masyarakat (Tilaar & Nugroho, 2012). Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi politik masyarakat Desa Wakuli memerlukan pendekatan inklusif, seperti sosialisasi kebijakan yang lebih luas dan peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan agar pembangunan desa berjalan secara demokratis dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan Desa Wakuli terbagi dalam dua bentuk, yaitu partisipasi aktif dan pasif. Partisipasi aktif terlihat melalui keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa, usulan kebijakan, pembayaran pajak, dan pemilihan kepala desa. Sementara itu, partisipasi pasif tercermin dalam kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah desa, seperti penerimaan bantuan sosial dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Meskipun masyarakat memiliki kesadaran akan pentingnya keterlibatan dalam pembangunan, masih terdapat kendala seperti faktor ekonomi dan kurangnya edukasi politik yang menghambat tingkat partisipasi mereka.

Faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi politik masyarakat meliputi kesadaran politik, apresiasi terhadap kebijakan pemerintah, serta dampak dari kebijakan pembangunan yang telah diterapkan. Kesadaran politik mendorong masyarakat untuk lebih kritis dan aktif dalam mengambil keputusan politik, sementara transparansi dan keterlibatan pemerintah dalam pembangunan dapat meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa, baik melalui peningkatan akses informasi maupun penguatan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

- Almond, G. A., & Powell., G. B. (2000). *"Comparative politics today: A world view."* (2000). Newyork: HarperCollins.
- Dwiningrum, S. I. (2011). *Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Heryanto, G. G. (2021). *Ragam Persoalan Komunikasi Politik Indonesia.* IRCISOD.
- Heywood, A. (2013). A Crisis in Politics. In *Politics* (pp. 443-459). London: Palgrave.
- Hutagalung, S. S. (2022). *PARTISIPASI DAN PEMBERDAYAAN DI SEKTOR PUBLIK.* Malang: Literasi Nusantara.
- Lichtman, M. (2013). *Qualitative research for the social sciences.* SAGE publications.
- Maschab, M. (2013). *Politik pemerintahan desa di Indonesia.* Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government, Department of Politics & Government.
- Masoed, M., & MacAndrews, C. (2018). *Perbandingan sistem politik.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Moelong, L. J. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Setiawan, A. (2022). *Pemerintahan desa: partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa.* Deepublish.
- Setiawan, R. (2017). Partisipasi Publik Dalam Program Bantuan Listrik Pedesaan Masyarakat Kabupaten Mesuji. *Jurnal e-JKPP*, 3(3).

Accepted : 20/10/2024 | Reviewed : 1/11/2024 | Publication : 31/01/2025

Suparto, D. (2020). *Membangun Kesadaran dan Partisipasi Politik Masyarakat*.
Badung: CENDEKIA PRESS .

Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. . Jakarta: PT Grasindo.

Tilaar, H., & Nugroho, R. (2012). *Kebijakan Pendidikan - Pengantar Untuk
Memahami Kebijakan Pendidikan Dan Kebijakan Pendidikan Sebagai
Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.